



Ekoteologi dalam Perspektif Filsafat Islam: Refleksi Bencana Banjir di Aceh-Sumatera

*Fitri Idani,¹ Ismail Fahmi Arrauf Nasution²

¹UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia

²IAIN Langsa, Aceh, Indonesia

¹251009002@student.ar-raniry.ac.id

²ismailfahmiarraufnasution@iainlangsa.ac.id

Abstract

Ideally, Islamic teachings provide a comprehensive ethical foundation such as the principles of tawhid, amanah, khalifah, and mizan to guide a harmonious relationship between humans and the natural environment. However, in reality, recurring ecological disasters such as the floods in Aceh–Sumatra reveal a significant gap between these theological ideals and actual environmental practices. This study aims to analyze the Aceh–Sumatra flood phenomenon through the lens of ecotheology in Islamic philosophy, examining how religious values can serve as a moral framework for understanding and responding to ecological crises. This research employs a qualitative library-based method using textual–philosophical analysis of Qur’anic ecological verses, works of classical and contemporary Muslim philosophers, and scientific literature on ecology and disaster studies. The findings indicate that ecological disasters arise not only from natural or structural factors but also from a moral crisis rooted in the disrupted human–nature relationship caused by weak internalization of Islamic ethical values. This study highlights the urgency of integrating Islamic environmental ethics into policy-making and disaster mitigation strategies to reinforce ecological balance and foster spiritual awareness within society.

Keywords: Islamic Ecotheology, Environmental Philosophy, Aceh Floods.

Abstrak

Idealnya ajaran Islam telah menyediakan prinsip-prinsip etis seperti tauhid, amanah, khalifah, dan mizan yang menjadi dasar bagi terciptanya hubungan

¹ Contributing Author

harmonis antara manusia dan alam. Namun realitasnya, berbagai bencana ekologis seperti banjir di Aceh–Sumatera menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai teologis tersebut dan praktik pengelolaan lingkungan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena banjir Aceh–Sumatera melalui perspektif ekoteologi dalam filsafat Islam, dengan menelaah bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat memberikan kerangka moral dalam memahami dan merespons krisis ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif berbasis analisis tekstual-filosofis terhadap ayat Al-Qur’an, karya filsuf Muslim, dan literatur ilmiah terkait ekologi dan kebencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bencana ekologis tidak hanya disebabkan oleh faktor alam dan struktural, tetapi juga oleh krisis moral yang lahir dari terganggunya relasi manusia dan alam akibat lemahnya internalisasi nilai teologis. Studi ini menegaskan pentingnya integrasi etika Islam dalam kebijakan lingkungan dan strategi mitigasi bencana sebagai langkah memperkuat keseimbangan ekologis dan kesadaran spiritual masyarakat.

Kata kunci: Ekoteologi Islam, Filsafat Lingkungan, Banjir Aceh.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, diskursus mengenai ekoteologi semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran global terhadap krisis lingkungan yang melanda berbagai belahan dunia. Perubahan iklim, kerusakan ekosistem, degradasi tanah, serta bencana hidrometeorologis kini tidak lagi dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai persoalan multidimensional yang menyentuh aspek moral, spiritual, dan peradaban manusia (Kartika et al., 2025). Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya sumber daya alam menghadapi tantangan ekologis yang serius, terutama kawasan Sumatera yang menjadi salah satu wilayah dengan kerentanan bencana paling tinggi. Di tengah dinamika tersebut, Aceh–Sumatera kembali menjadi sorotan setelah serangkaian banjir yang memutus akses permukiman, merusak infrastruktur, serta mengganggu aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. Fenomena ini menempatkan relasi manusia dan alam sebagai pusat perhatian, sekaligus membuka ruang refleksi filosofis bahwa kerusakan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari paradigma dan cara pandang manusia terhadap ciptaan. Dalam konteks ini, ekoteologi khususnya dalam perspektif filsafat Islam memberikan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami bahwa krisis ekologis merupakan persoalan keterputusan nilai dan hilangnya kesadaran tauhid dalam pengelolaan alam.

Studi mengenai ekoteologi dalam filsafat Islam menyoroti bagaimana konsep-konsep fundamental seperti tauhid, amanah, khalifah, dan mizan memandu manusia dalam membangun hubungan harmonis dengan alam (Wasil & Muizudin, 2023). Ayat-ayat Al-Qur’an telah berulang kali menegaskan bahwa alam

bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi tanda-tanda (ayat kauniyah) yang merefleksikan kebijaksanaan Tuhan. Namun kenyataannya, banjir yang terjadi di Aceh–Sumatera menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara nilai moral ekologis yang diajarkan Islam dengan praktik kehidupan masyarakat modern yang cenderung mengedepankan kepentingan ekonomi jangka pendek. Deforestasi, pembukaan lahan tanpa kontrol ekologis, dan perubahan fungsi kawasan resapan menjadi permukiman hanyalah beberapa contoh bagaimana perilaku manusia berpotensi merusak stabilitas ekologis. Dalam perspektif filosofis, fenomena ini mencerminkan krisis etika lingkungan, sebuah gejala ketika manusia gagal memaknai perannya sebagai khalifah dan justru mengelola alam secara destruktif. Dengan begitu refleksi banjir Aceh–Sumatera melalui pendekatan ekoteologi Islam tidak hanya penting untuk membaca sebab-sebab empirisnya, tetapi juga untuk menggali dimensi moral yang lebih dalam.

Ajaran Islam seharusnya telah memberikan pedoman etis yang komprehensif untuk menjaga keseimbangan alam. Prinsip tauhid menuntun manusia mengakui keterhubungan segala sesuatu, prinsip amanah menegaskan tanggung jawab moral dalam mengelola ciptaan, dan prinsip mizan mengajarkan pentingnya keseimbangan ekologis sebagai bagian dari keharmonisan kosmik (Widiastuty & Anwar, 2025). Bila nilai-nilai tersebut dipraktikkan secara konsekuen, maka relasi manusia dan alam akan terjaga, dan risiko bencana ekologis dapat diminimalisir. Namun realitasnya, implementasi nilai-nilai etis tersebut sering kali terbatas pada ranah tekstual dan belum terintegrasi secara efektif dalam kebijakan pembangunan, pendidikan masyarakat, dan perilaku sosial sehari-hari. Banjir yang berulang di Aceh–Sumatera menunjukkan bahwa krisis ekologis bukan hanya akibat fenomena alam, tetapi juga cerminan lemahnya internalisasi nilai moral dalam praksis pengelolaan lingkungan. Ketidaksesuaian antara idealitas ajaran dan praktik sosial inilah yang menjadi masalah utama penelitian ini, karena tanpa perbaikan paradigma, bencana ekologis akan terus menjadi siklus yang berulang.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam bagaimana ekoteologi dalam perspektif filsafat Islam dapat digunakan untuk membaca dan memahami fenomena banjir Aceh–Sumatera sebagai sebuah refleksi moral dan teologis. Penelitian juga berupaya mengidentifikasi kontribusi filsafat Islam dalam menawarkan kerangka etis bagi pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Selain itu, kajian ini memberikan kontribusi penting bagi penguatan perspektif keagamaan dalam mitigasi bencana, pengembangan kebijakan publik yang responsif terhadap nilai-nilai ekologis, serta perluasan literatur akademik tentang hubungan antara teologi, filsafat, dan lingkungan. Dengan mengintegrasikan refleksi filosofis, analisis teologis, dan realitas empiris bencana, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai peran agama dalam merespons krisis ekologis dan menjadi rujukan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif yang memusatkan perhatian pada penafsiran makna, pendalaman konteks, serta pembacaan filosofis terhadap gagasan-gagasan ekoteologi Islam dalam kaitannya dengan fenomena banjir di Aceh–Sumatera (Abdurrahman, 2024). Metodologi yang digunakan adalah analisis tekstual-filosofis yang mengkaji ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur'an, pandangan para filsuf Muslim klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah yang relevan dengan isu ekologi, teologi, dan etika lingkungan. Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis, karya-karya filsuf Islam seperti Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Ghazali, dan Ibn Arabi, serta dokumen-dokumen keislaman yang membahas konsep tauhid, amanah, khalifah, dan mizan. Adapun sumber sekunder terdiri dari artikel akademik, buku-buku kajian lingkungan, laporan bencana dari lembaga resmi, dan penelitian mutakhir yang mengulas dinamika ekologis di Aceh–Sumatera. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi tema, interpretasi filosofis, dan sintesis konseptual, sedangkan validasi data serta uji keabsahan dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, pembacaan berulang terhadap teks, dan perbandingan antar-literatur untuk memastikan konsistensi makna. Sistem penyusunan draft naskah dilakukan secara sistematis dengan alur mulai dari pengumpulan data literatur, pemetaan gagasan, penyusunan kerangka tulisan, analisis mendalam, hingga perumusan argumentasi akhir yang koheren antara aspek teologis, filosofis, dan fenomena ekologis kontemporer.

Landasan Ekoteologi dalam Tradisi Filsafat Islam: Konsep Tauhid, Amanah, dan Keteraturan Kosmos

Pembahasan mengenai ekoteologi dalam tradisi filsafat Islam merupakan suatu upaya untuk menempatkan kembali hubungan manusia dengan alam dalam kerangka teologis yang utuh dan bermakna. Di tengah meningkatnya krisis lingkungan global mulai dari perubahan iklim, kerusakan ekosistem, hingga menipisnya sumber daya alam diperlukan sebuah paradigma yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengakar pada nilai-nilai spiritual yang mendalam. Islam, sebagai sebuah sistem nilai yang komprehensif, telah sejak awal meletakkan dasar moral dan filosofis mengenai bagaimana manusia seharusnya memandang, memaknai, dan memperlakukan alam semesta. Dengan pendekatan ekoteologis, hubungan antara manusia dan lingkungan ditempatkan dalam bingkai keesaan Tuhan, tanggung jawab moral manusia, serta keteraturan kosmos yang merupakan manifestasi dari kebijaksanaan ilahi (Lutfiyah & Kurjum, 2024). Pemahaman ini sekaligus membuka ruang refleksi kritis bagi masyarakat modern untuk menilai kembali cara mereka memperlakukan alam, tidak sekadar sebagai objek eksploitasi, melainkan sebagai bagian dari amanah spiritual.

Dalam tataran historis, tradisi filsafat Islam telah mengembangkan cara pandang kosmologis yang sangat kaya dan berlapis. Para filsuf Muslim klasik seperti Al-Farabi, Ibn Sina, dan Ibn Rusyd membangun kerangka metafisika yang

melihat kosmos sebagai realitas yang teratur, harmonis, dan memiliki tujuan. Di sisi lain, para pemikir tasawuf seperti Al-Ghazali, Ibn Arabi, dan Jalaluddin Rumi memandang alam sebagai tanda-tanda (ayat) yang berbicara tentang kehadiran Tuhan di setiap sudut realitas (Theguh Saumantri & Usman Ismail, 2025). Semua ini menunjukkan bahwa alam bukanlah sesuatu yang bebas nilai tetapi sarat makna, spiritualitas, dan fungsi pedagogis bagi manusia. Tradisi pemikiran ini menegaskan bahwa pemahaman ekologis dalam Islam tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan merupakan kelanjutan dari pandangan kosmologis yang telah lama melekat dalam filsafat Islam.

Konsep tauhid merupakan fondasi utama dalam ekoteologi Islam dan menjadi titik tolak seluruh bangunan teologis (Wafa, 2025a). Tauhid tidak hanya mengajarkan bahwa Tuhan adalah satu, tetapi juga menegaskan bahwa seluruh realitas berasal dari sumber yang sama dan terikat dalam kesatuan sistem yang tidak terpisahkan. Dalam konteks lingkungan, tauhid menolak pandangan dualistik yang memisahkan manusia dari alam atau menempatkan manusia sebagai penguasa absolut alam. Sebaliknya, tauhid mengajarkan bahwa manusia dan alam sama-sama ciptaan Tuhan yang tunduk pada hukum-hukum ilahi. Hal ini memiliki implikasi filosofis mendalam yang mana bila merusak alam berarti merusak keteraturan ciptaan-Nya, dan menghormati alam berarti menegakkan nilai keesaan Tuhan dalam tindakan nyata.

Dalam perspektif filsafat Islam, tauhid juga menciptakan hubungan interdependensi antara manusia dan alam. Sebagai bagian dari makhluk Tuhan, manusia memiliki peran sebagai khalifah yang harus menjaga keteraturan kosmos, bukan menguasainya secara eksploitatif. Pemahaman ini menuntut manusia untuk melihat alam bukan sekadar sebagai sumber daya material, tetapi juga sebagai ruang spiritual yang mengandung makna simbolik. Setiap fenomena alam, seperti pergerakan bintang, siklus air, atau tumbuhnya tanaman, merupakan manifestasi dari kehendak dan hikmah Tuhan. Ketika manusia mengganggu keseimbangan ekologis, sesungguhnya sedang bertindak bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid. Filsafat Islam memandang bahwa ketaatan manusia terhadap tauhid harus terimplementasi dalam sikap ekologis yang bertanggung jawab, karena keteraturan alam merupakan bagian dari tatanan tauhid yang harus dijaga.

Selain tauhid, konsep amanah juga menjadi pilar utama dalam ekoteologi Islam (Wafa, 2025). Amanah mengandung arti tanggung jawab moral yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk mengelola bumi secara bijaksana. Dalam pandangan filsafat Islam, kedudukan manusia sebagai khalifah tidak berarti superioritas yang bersifat dominatif, melainkan mandat untuk menjaga dan mengelola alam sesuai dengan batas-batas etika yang ditetapkan Tuhan. Amanah juga mengimplikasikan adanya konsekuensi moral dan eskatologis. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan terhadap alam. Karena itu tindakan eksploitasi yang merusak lingkungan bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga persoalan spiritual dan etis. Amanah menjadikan lingkungan bukan

sekadar ruang hidup, tetapi sebagai ladang ujian bagi manusia dalam menunjukkan akhlak dan tanggung jawabnya sebagai makhluk berakal.

Konsep amanah dalam tradisi filsafat Islam juga menekankan pentingnya kesadaran diri (*self-awareness*) dan kontrol diri (*self-restraint*). Dalam banyak teks klasik, manusia digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kecenderungan untuk melampaui batas apabila tidak dibimbing oleh akal dan nilai-nilai ketuhanan. Menjaga alam menjadi bagian dari praktik spiritual yang menuntut kedewasaan moral. Seseorang yang benar-benar memahami amanah akan menghindari perilaku berlebihan, seperti konsumsi yang membabi buta, penebangan hutan secara ilegal, atau penggunaan sumber daya secara tidak proporsional. Dalam kerangka ini, amanah bukan sekadar tugas administratif, melainkan etika hidup yang menuntut sikap moderat, keseimbangan, dan keadilan ekologis. Kesadaran terhadap amanah mendorong manusia untuk hidup selaras dengan alam demi terwujudnya keberlanjutan.

Sementara itu, konsep keteraturan kosmos (*nazhm al-kawn*) merupakan aspek metafisis penting yang dijelaskan oleh para filsuf Muslim seperti Ibn Sina dan Al-Farabi (Qonita et al., 2025). Mereka memandang alam sebagai sistem yang bekerja berdasarkan hukum-hukum yang konsisten, rasional, dan mencerminkan kebijaksanaan ilahi. Keteraturan ini terlihat pada pergerakan planet, siklus musim, struktur organisme hidup, serta hubungan antara elemen-elemen alam. Dengan memahami keteraturan kosmos, manusia diajak untuk menyadari bahwa kerusakan ekologis merupakan akibat dari campur tangan manusia yang melanggar hukum-hukum alam tersebut. Dalam filsafat Islam, kosmos tidak bersifat kacau atau tanpa tujuan; ia merupakan cermin keindahan dan keharmonisan Tuhan yang harus dihormati.

Keteraturan kosmos juga menekankan pentingnya keseimbangan (*mīzān*) sebagai prinsip ekologis dalam Islam. Al-Qur'an berulang kali menyinggung *mizan* sebagai hukum keseimbangan yang harus dijaga agar kehidupan tetap berjalan harmonis. Jika keseimbangan alam terganggu melalui pencemaran, perusakan habitat, atau eksploitasi berlebihan, maka dampaknya akan kembali kepada manusia sendiri. Para filsuf Muslim menjelaskan bahwa setiap bentuk ketidakseimbangan merupakan tanda bahwa manusia telah keluar dari fungsi kekhalifahannya. Dalam kerangka ekoteologi, menjaga *mizan* berarti menghormati tatanan kosmik yang telah diciptakan Tuhan secara sempurna. Keseimbangan ini menjadi prinsip etis yang mengikat manusia untuk bertindak dengan bijak dalam mengelola lingkungan.

Ketiga konsep ini tauhid, amanah, dan keteraturan kosmos saling terkait dan membentuk paradigma ekoteologi Islam yang komprehensif. Tauhid memberikan fondasi metafisis, amanah memberikan landasan etis, dan keteraturan kosmos memberikan dasar empiris dan kosmologis. Dengan menggabungkan ketiganya, tradisi filsafat Islam menawarkan pandangan holistik mengenai lingkungan. Paradigma ini tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga dapat diterapkan dalam kebijakan lingkungan modern. Misalnya, pengembangan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat dipadukan dengan

nilai amanah, sedangkan pendidikan lingkungan dapat diletakkan dalam kerangka tauhid dan mizan.

Dalam konteks modern, banyak tantangan ekologis muncul karena manusia terlalu mengandalkan pendekatan teknologis dan ekonomis yang sering mengabaikan dimensi spiritual dan etis. Eksploitasi alam yang berlebihan, polusi industri, dan ketidakadilan lingkungan adalah contoh dari kegagalan manusia dalam memahami amanah dan keteraturan kosmos. Tradisi filsafat Islam mengingatkan bahwa penyelesaian masalah lingkungan tidak sepenuhnya dapat mengandalkan aspek teknis tetapi membutuhkan transformasi kesadaran. Kesadaran tauhid mengajarkan manusia untuk memandang alam sebagai entitas sakral, bukan sekadar benda mati. Kesadaran amanah mengubah pola konsumsi dan gaya hidup. Kesadaran keteraturan kosmos memandu manusia agar tidak merusak hukum-hukum alam demi kepentingan sesaat.

Implementasi ekoteologi Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan melalui pendidikan, kebijakan publik, dan pengembangan budaya ekologis. Dalam pendidikan, nilai tauhid dan amanah dapat dimasukkan dalam kurikulum yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah. Dalam kebijakan publik, pemerintah dapat merumuskan program yang mengutamakan keseimbangan ekologis serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam konservasi alam. Pada level keluarga dan komunitas, nilai-nilai keteraturan kosmos dapat dihidupkan melalui perilaku hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan, atau mengembangkan gaya hidup ramah lingkungan. Semua tindakan ini merupakan bentuk implementasi langsung dari prinsip-prinsip ekoteologi Islam dalam kehidupan nyata.

Landasan ekoteologi dalam tradisi filsafat Islam tidak hanya memberikan kerangka pemikiran, tetapi juga menyediakan arah moral bagi umat manusia dalam menghadapi krisis lingkungan global. Konsep tauhid menegaskan kesatuan seluruh ciptaan, amanah mengingatkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah, dan keteraturan kosmos menunjukkan bahwa alam bekerja dengan harmoni yang harus dihormati. Ketika ketiga prinsip ini diinternalisasi dalam kesadaran kolektif, maka lahirlah etika ekologis yang mampu mengembalikan hubungan manusia dengan alam secara lebih sehat, beradab, dan spiritual. Oleh karena itu, filsafat Islam tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga menjadi sumber inspirasi penting bagi upaya penyelamatan lingkungan di era modern.

Manusia sebagai Khalifah dan Pengelola Lingkungan: Analisis Filsafat Etika Lingkungan dalam Islam

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu global yang paling mendesak pada era modern. Kerusakan hutan, pencemaran udara, degradasi tanah, dan penipisan sumber daya alam kini menciptakan ancaman serius bagi keberlanjutan hidup manusia. Situasi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan etika dan kesadaran manusia atas posisinya di dunia. Dalam Islam, hubungan manusia

dengan lingkungan tidak sekadar bersifat praktis, melainkan berakar pada struktur teologis dan filosofis yang mendalam. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang istimewa sekaligus bertanggung jawab melalui konsep khalifah. Dari sinilah etika lingkungan Islam berkembang menjadi pendekatan komprehensif yang mencakup aspek spiritual, moral, sosial, dan ekologis.

Sejak awal, Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi (Fauzan, 2022). Khalifah dalam pengertian Islam tidak berarti penguasa yang bebas bertindak semaunya, tetapi lebih tepat dimaknai sebagai wakil Tuhan yang berkewajiban menjaga, merawat, dan mengelola bumi. Dalam tradisi filsafat Islam, posisi ini menunjukkan bahwa manusia berada pada pertemuan antara dimensi spiritual dan dimensi material. Kesadaran akan dua dimensi ini menempatkan manusia pada tanggung jawab etis terhadap lingkungan. Dengan memahami tugas kekhalifahan, manusia dapat menempatkan dirinya secara proporsional dalam ekosistem, tidak berlebihan dalam memanfaatkan alam, dan tidak abai terhadap keberlanjutannya.

Dalam filsafat Islam, konsep khalifah memiliki landasan metafisis dan kosmologis yang kuat. Para filsuf Muslim seperti Al-Farabi dan Ibn Sina menekankan bahwa manusia adalah makhluk rasional yang diberi kemampuan memahami tatanan kosmos. Potensi akal ini memungkinkan manusia mengelola alam berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan. Oleh karena itu, tugas manusia terhadap lingkungan bukan hanya perintah moral, tetapi juga konsekuensi logis dari kapasitas intelektual yang telah dianugerahkan. Ketika akal digunakan secara bijaksana, manusia dapat menjaga harmoni ekologis. Namun ketika disalahgunakan, kerusakan lingkungan menjadi akibat yang tidak dapat dihindari.

Kedudukan manusia sebagai khalifah juga berkaitan erat dengan konsep amanah yang diuraikan dalam Al-Qur'an. Amanah merupakan tanggung jawab moral dan spiritual yang diberikan Tuhan kepada manusia, tidak kepada makhluk lain. Dalam konteks etika lingkungan, amanah mencakup kewajiban menjaga bumi, mencegah kerusakan, dan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan ekologis. Menebang pohon sembarangan, mencemari air, atau mengeksploitasi mineral tanpa memikirkan generasi mendatang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah. Amanah menuntut manusia untuk menggunakan sumber daya secara proporsional dan bertanggung jawab, bukan untuk memenuhi keserakahan.

Etika lingkungan Islam juga didasarkan pada prinsip tawazun atau keseimbangan (Amanda et al., 2024). Alam bekerja berdasarkan sistem yang harmonis, terukur, dan saling terkait, sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an melalui konsep mizan. Setiap makhluk memiliki fungsi dan peran dalam menjaga keharmonisan sistem ekologis. Jika manusia merusak salah satu komponen tersebut, maka keseluruhan sistem dapat terganggu. Dalam perspektif filsafat alam Islam, menjaga keseimbangan ini merupakan kewajiban moral sekaligus spiritual. Merusak lingkungan berarti menantang ketetapan Tuhan dan menciptakan ketidakseimbangan yang pada akhirnya merugikan manusia sendiri.

Hubungan manusia dengan lingkungan dalam Islam tidak bersifat antroposentris absolut. Islam mengajarkan bahwa semua makhluk, termasuk hewan, tumbuhan, dan benda-benda langit, merupakan komunitas spiritual yang juga memuji Tuhan. Alam bukan sekadar objek yang dapat dieksploitasi sesuka hati, tetapi memiliki nilai intrinsik sebagai ciptaan Ilahi. Dalam filsafat etika lingkungan Islam, nilai alam tidak hanya ditentukan oleh manfaatnya bagi manusia, tetapi juga oleh hakikat penciptaannya. Perspektif ini menuntut sikap hormat dan ihsan, yaitu berbuat baik kepada lingkungan, sebagaimana manusia dituntut berbuat baik kepada sesama.

Konsep 'adl atau keadilan juga menjadi prinsip penting dalam etika lingkungan Islam. Keadilan ekologis bermakna memberikan hak kepada lingkungan sesuai fungsinya serta tidak mengambil sesuatu secara berlebihan. Ibn Khaldun menyatakan bahwa peradaban manusia dapat runtuh jika lingkungan mengalami kerusakan akibat keserakahan dan ketidakadilan. Eksploitasi yang tidak terkendali merupakan bentuk ketidakadilan ekologis yang berdampak luas pada masyarakat, terutama generasi berikutnya. Keadilan menjadi dasar moral yang mengatur hubungan manusia dengan alam, agar penggunaan sumber daya tetap berada dalam batas-batas keberlanjutan.

Tradisi tasawuf memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan etika lingkungan Islam. Para sufi seperti Ibn Arabi, Jalaluddin Rumi, dan Al-Ghazali melihat alam sebagai cerminan keindahan Tuhan. Setiap unsur alam dianggap sebagai tanda atau ayat Tuhan yang harus dihormati. Pandangan ini menumbuhkan sikap lembut, penuh empati, dan penuh kesadaran spiritual dalam memperlakukan alam. Dalam perspektif sufi, merusak alam sama dengan mengabaikan kehadiran Ilahi yang termanifestasi di dalamnya. Dimensi spiritual ini memberikan kedalaman tambahan bagi etika lingkungan Islam yang tidak hanya berorientasi rasional, tetapi juga emosional dan transendental.

Implementasi konsep khalifah dalam kehidupan modern memiliki implikasi nyata, terutama dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Seorang khalifah tidak boleh merusak bumi yang dipercayakan kepadanya, sehingga setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya harus direncanakan secara terukur, penggunaan energi harus ramah lingkungan, dan limbah harus dikelola dengan bijak. Nilai-nilai Islam menolak pembangunan yang menciptakan kerusakan ekologis jangka panjang. Dalam konteks ini, etika lingkungan Islam memberikan arah moral untuk kebijakan publik dan langkah-langkah ekologis praktis.

Pada tingkat sosial, masyarakat memegang peran strategis dalam menghidupkan nilai-nilai etika lingkungan berbasis Islam. Kesadaran bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah dapat menumbuhkan gerakan sosial yang berorientasi pada pelestarian alam. Pendidikan lingkungan berbasis nilai keislaman dapat diperkuat melalui berbagai lembaga seperti sekolah, pesantren, masjid, dan komunitas masyarakat. Selain itu, konsep ukhuwah atau persaudaraan dapat diperluas menjadi ukhuwah ekologis, yaitu kesadaran bahwa

manusia dan alam memiliki hubungan saling membutuhkan. Ketika masyarakat memiliki kesadaran kolektif seperti ini, perilaku ramah lingkungan akan lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, realitas modern menunjukkan bahwa konsep khalifah sering disalahpahami sebagai legitimasi untuk mengeksploitasi alam secara bebas. Banyak manusia memosisikan dirinya sebagai penguasa absolut yang berhak mengambil apa pun dari alam tanpa memperhatikan akibatnya. Pandangan ini merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran Islam. Etika lingkungan Islam hadir sebagai kritik terhadap gaya hidup konsumtif yang mendorong kerusakan ekologis. Dengan mengembalikan pemahaman khalifah pada makna spiritual dan moralnya, manusia dapat memperbaiki pola hubungan dengan alam serta menghindari kehancuran ekologis yang diciptakan oleh tangan mereka sendiri.

Oleh karena itu, konsep manusia sebagai khalifah dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang menggabungkan tanggung jawab ekologis, moral, sosial, dan spiritual. Islam menawarkan kerangka etika lingkungan yang paling lengkap dengan mengajarkan amanah, keseimbangan, keadilan, dan ihsan sebagai pedoman praktis maupun filosofis. Jika nilai-nilai tersebut dihidupkan kembali di era modern, maka manusia dapat membangun pola hidup yang lebih berkelanjutan dan selaras dengan tujuan penciptaannya. Etika lingkungan Islam tidak hanya memberikan panduan teoritis, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi transformasi sosial menuju kehidupan yang harmonis dengan alam.

Kerusakan Lingkungan sebagai Konsekuensi Moral: Membaca Ayat-Ayat Ekologis dalam Perspektif Filosofis

Kerusakan lingkungan pada era modern tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah teknis, melainkan sebagai persoalan moral yang mencerminkan hubungan manusia dengan alam di tingkat yang paling mendasar (Mursi et al., 2023). Lingkungan hidup yang semestinya menjadi ruang harmonis tempat manusia menjalankan kehidupan kini berubah menjadi area krisis akibat eksploitasi berlebihan, hilangnya kendali etis, serta dominasi cara pandang materialistik. Dalam konteks ini, agama khususnya Islam hadir bukan hanya sebagai sistem aturan ritual, tetapi juga sebagai kerangka nilai etis yang menawarkan panduan dalam memaknai relasi ekologis. Ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur'an memberikan peringatan sekaligus arahan tentang bagaimana kerusakan alam terjadi karena ulah manusia, dan bagaimana manusia seharusnya bersikap sebagai makhluk bermoral yang bertanggung jawab. Maka, memahami kerusakan lingkungan menjadi upaya membaca kembali ayat-ayat Tuhan melalui lensa filosofis yang menekankan nilai moral sebagai dasar pengelolaan alam.

Dalam pandangan filosofis Islam, alam tidak hadir secara kebetulan, tetapi merupakan ciptaan yang memiliki keteraturan, makna, dan tujuan. Alam adalah tanda-tanda (ayat) yang mengarahkan manusia pada kesadaran akan kebesaran dan kearifan Tuhan. Namun ketika manusia mengabaikan pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut, maka kerusakan menjadi konsekuensi yang

tidak terelakkan. Relasi manusia-alam sejatinya dibangun di atas kesalingtergantungan; manusia membutuhkan alam untuk hidup, dan alam membutuhkan manusia untuk dirawat. Ketika hubungan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka ketidakharmonisan ekologis muncul sebagai penanda runtuhnya etika. Perspektif filosofis menyatakan bahwa krisis lingkungan merupakan cermin dari krisis moral, krisis yang lahir dari hilangnya orientasi spiritual dan nilai etika dalam mengelola sumber daya.

Dalam Al-Qur'an, term "fasad" sering dikaitkan dengan kerusakan yang terjadi di darat maupun laut, dan ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan itu disebabkan oleh perbuatan manusia sendiri (Adila et al., 2025). Ungkapan ini bukan sekadar kecaman, melainkan penegasan bahwa tindakan manusia memiliki konsekuensi moral dan ekologis sekaligus. Ketika manusia melampaui batas, merusak keseimbangan, atau mengeksploitasi alam tanpa memperhatikan dampaknya, maka fasad adalah akibat yang logis. Dalam kerangka filosofis, ayat ini menunjukkan bahwa alam menjadi "cermin moral" bagi manusia. Alam memperlihatkan secara nyata bagaimana sifat tamak, serakah, dan tidak peduli menjadi penyebab utama kehancuran ekosistem.

Ayat-ayat ekologis juga menekankan pentingnya keseimbangan (*mīzān*) sebagai fondasi ciptaan. Al-Qur'an menggambarkan bahwa seluruh penciptaan berjalan dengan takaran yang tepat, keteraturan yang seimbang, dan hukum-hukum alam yang tidak pernah keliru. Namun keseimbangan ini dapat terganggu jika manusia bertindak tanpa mengindahkan nilai moral. Perspektif filosofis menegaskan bahwa ketidakseimbangan ekologis, baik berupa perubahan iklim, kepunahan spesies, maupun degradasi lahan adalah tanda bahwa manusia telah mengacaukan harmoni penciptaan. Ketika *mīzān* dilanggar, maka kerusakan menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Dengan demikian, ayat-ayat ekologis memberi landasan bagi manusia untuk mengembalikan keseimbangan ini melalui kesadaran moral dan praktik pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab.

Kerangka etika lingkungan dalam Islam tidak hanya bersumber dari larangan merusak, tetapi juga dari perintah untuk memakmurkan dan menjaga bumi. Tugas manusia sebagai khalifah tidak hanya dipahami dalam konteks kekuasaan, melainkan dalam kesadaran tanggung jawab moral. Filosofi khalifah memberikan makna bahwa kekuasaan tanpa etika hanyalah kezaliman, sedangkan kekuasaan yang dibangun di atas tanggung jawab akan menghasilkan keberlanjutan. Ketika manusia gagal menjalankan mandat kekhalifahan, maka kerusakan lingkungan menjadi bukti konkret kegagalan moral tersebut. Ayat-ayat ekologis mendorong manusia untuk mengembalikan makna khalifah sebagai penjaga, bukan penguasa yang semena-mena.

Kerusakan lingkungan dapat dianalisis secara filosofis sebagai fenomena yang lahir dari cara pandang antroposentris ekstrem, yaitu pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat segala hal dan menghalalkan eksploitasi alam demi kepentingan diri. Al-Qur'an mengingatkan bahwa manusia sering kali melampaui batas karena mengikuti hawa nafsu dan keserakahan. Kerusakan lingkungan hari ini mencerminkan bagaimana nilai-nilai moderasi ditinggalkan

demikian kepuasan jangka pendek. Perspektif filosofis Islam memandang bahwa orientasi hidup yang tidak seimbang antara dunia dan akhirat menyebabkan manusia mengabaikan etika ekologis. Ayat-ayat ekologis berfungsi sebagai kritik terhadap pola pikir yang destruktif ini.

Pembacaan filosofis terhadap ayat-ayat ekologis juga mengungkapkan bahwa alam memiliki hak moral untuk dijaga. Islam melihat alam bukan sekadar objek pasif, tetapi bagian dari sistem kosmik yang memiliki martabat ciptaan. Dalam banyak ayat, alam digambarkan sebagai makhluk yang bertasbih, tunduk pada hukum Tuhan, dan menjalankan tugasnya secara harmonis. Ketika manusia merusak alam, maka ia tidak hanya melanggar etika ekologis, tetapi juga merusak harmoni kosmik yang ditetapkan Tuhan. Perspektif ini memberikan dimensi spiritual yang dalam dalam memahami krisis lingkungan: alam bukan hanya rusak secara fisik, tetapi juga secara moral karena manusia mengingkari amanah.

Salah satu aspek filosofis penting dalam ayat-ayat ekologis adalah konsep tanggung jawab lintas generasi. Kerusakan lingkungan bukan hanya berdampak pada manusia saat ini, tetapi juga pada generasi mendatang. Al-Qur'an menegaskan pentingnya mempertimbangkan akibat dari setiap tindakan, dan hal ini relevan dalam isu lingkungan. Eksploitasi berlebihan, penebangan hutan, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta polusi yang tidak terkendali adalah bentuk kezaliman terhadap generasi masa depan. Perspektif filosofis Islam memandang bahwa menjaga keberlanjutan adalah perwujudan keadilan, dan keadilan merupakan prinsip moral tertinggi dalam Islam.

Kerusakan lingkungan juga dapat dipahami sebagai kegagalan manusia membaca dan mengambil hikmah dari ayat-ayat Tuhan yang tersebar di alam. Al-Qur'an sering mengajak manusia untuk memperhatikan langit, bumi, gunung, tumbuhan, dan hewan sebagai tanda kebesaran Tuhan. Namun ketika manusia gagal membaca tanda-tanda ini, maka ia kehilangan orientasi moral dan spiritual. Perspektif filosofis menyatakan bahwa memahami alam adalah bagian dari proses mengenal diri dan mengenal Tuhan. Ketika proses ini terputus, maka kerusakan lingkungan lahir dari ketidaktahuan, kelalaian, dan kehilangan kesadaran spiritual.

Ayat-ayat ekologis juga memberikan penekanan pada konsep larangan perbuatan israf (berlebihan). Dalam banyak ayat dan hadis, Islam mengecam tindakan berlebih-lebihan dalam penggunaan sumber daya, makanan, maupun harta. Israf dalam konteks ekologis hari ini dapat dilihat dalam pola konsumsi global yang boros, kultur ekonomi yang eksploitatif, serta gaya hidup yang tidak ramah lingkungan. Dari perspektif filosofis, israf merupakan akar dari banyak kerusakan ekologis karena ia berasal dari ketidakmampuan manusia menahan diri dan mengatur keinginan. Ayat-ayat ekologis mengingatkan bahwa pemborosan adalah bentuk ketidakadilan terhadap alam dan sesamanya.

Relasi antara kerusakan lingkungan dan moralitas juga terlihat dalam konsep amanah. Setiap sumber daya yang diberikan Tuhan merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Ketika amanah ini diabaikan, maka kerusakan lingkungan menjadi bukti bahwa manusia gagal menjaga apa yang dipertanggungjawabkan kepadanya. Perspektif filosofis melihat bahwa

amanah bukan hanya tanggung jawab individual, tetapi juga kolektif masyarakat, pemerintah, dan institusi memiliki peran dalam menjaga lingkungan. Ayat-ayat ekologis memberikan landasan bahwa amanah ekologis adalah bagian integral dari etika sosial.

Kerusakan lingkungan harus dipahami sebagai panggilan moral bagi manusia untuk kembali pada nilai-nilai etis dan spiritual. Ayat-ayat ekologis dalam Al-Qur'an menawarkan orientasi moral yang tidak hanya mengajak manusia untuk berhenti merusak, tetapi juga membangun kembali keseimbangan dan keharmonisan alam. Perspektif filosofis menegaskan bahwa menyelamatkan lingkungan bukan sekadar tugas teknis, tetapi juga perjalanan moral untuk mengembalikan hubungan manusia dengan Tuhan dan ciptaan-Nya. Maka, membaca ayat-ayat ekologis adalah upaya membangun kesadaran baru, bahwa menjaga alam berarti menjaga diri sendiri, menjaga masa depan, dan menjaga amanah Ilahi.

Banjir Aceh–Sumatera sebagai Cermin Krisis Relasi Manusia Alam: Analisis Sebab, Dampak, dan Makna Teologis

Banjir yang melanda wilayah Aceh dan sebagian besar kawasan Sumatera dalam beberapa tahun terakhir bukan hanya menjadi fenomena alam yang berulang, tetapi juga menampilkan gambaran nyata tentang rapuhnya relasi antara manusia dan lingkungannya. Peristiwa banjir tersebut tidak dapat lagi dilihat sebagai bencana musiman, melainkan sebagai cerminan krisis ekologis yang lebih luas, yang memperlihatkan bagaimana keseimbangan alam terganggu oleh tindakan manusia. Dalam konteks ini, banjir Aceh–Sumatera menjadi pintu masuk penting untuk membaca ulang interaksi manusia dengan alam yang kini diselimuti oleh pola eksploitatif dan minim kesadaran ekologis. Narasi bencana tersebut menunjukkan bahwa alam sedang memberikan “peringatan” melalui tanda-tanda kerusakan yang semakin sering muncul, menuntut manusia untuk mengambil sikap kritis terhadap perilaku mereka sendiri.

Fenomena banjir Aceh–Sumatera tidak dapat dipisahkan dari dinamika perubahan iklim global yang mempercepat intensitas hujan, pola cuaca ekstrem, dan ketidakpastian iklim. Namun demikian, perubahan iklim hanyalah salah satu faktor dari rangkaian sebab yang lebih kompleks. Di wilayah-wilayah ini, laju deforestasi yang tinggi, pembukaan lahan secara masif, serta hilangnya tutupan vegetasi memperparah kerentanan ekosistem. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai penahan air dan penjaga keseimbangan hidrologis justru terus berkurang akibat aktivitas manusia (Putra & Kartika, 2025). Ketika kemampuan tanah untuk menyerap air menurun, intensitas hujan yang sedikit lebih tinggi saja sudah cukup untuk memicu luapan sungai dan banjir besar. Oleh sebab itu, banjir Aceh–Sumatera adalah hasil dari perpaduan antara fenomena global dan kesalahan pengelolaan lokal.

Selain itu, adanya perubahan tata ruang permukiman menjadi salah satu penyebab utama yang memperburuk dampak banjir. Pembangunan yang tidak

terencana, berkembangnya permukiman di daerah sempadan sungai, serta penyempitan aliran air akibat infrastruktur yang tidak mengikuti analisis lingkungan memperbesar risiko bencana. Banyak daerah yang dulunya merupakan kawasan resapan kini berubah menjadi lahan terbangun yang tidak lagi mampu menahan limpahan air. Pandangan antroposentris yang hanya berfokus pada pemanfaatan ruang tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem turut menghilangkan fungsi-fungsi ekologis penting.

Di sisi lain, aktivitas tambang, perkebunan skala besar, dan industri ekstraktif memainkan peran signifikan dalam memperburuk kondisi lingkungan. Aceh dan Sumatera memiliki kawasan kaya sumber daya alam yang sering kali dieksploitasi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang. Pertambangan yang mengubah struktur tanah, pembuangan limbah ke sungai, dan penggunaan alat berat yang merusak kontur lahan membuat ekosistem semakin rapuh. Ketika hujan turun, tanah yang gundul tidak mampu lagi menahan erosi sehingga sedimentasi meningkat dan aliran sungai menjadi dangkal. Kondisi ini mempercepat meluapnya air sungai, menjadikan banjir sebagai konsekuensi logis dari kesalahan pengelolaan lingkungan.

Dampak banjir Aceh–Sumatera tidak hanya berhenti pada kerusakan fisik wilayah, tetapi juga meluas pada kehidupan sosial masyarakat. Ribuan rumah terendam, lahan pertanian hancur, dan akses transportasi terputus, menyebabkan kerugian ekonomi besar yang sulit pulih dalam waktu singkat. Kehilangan mata pencaharian, terganggunya aktivitas sekolah, serta meningkatnya kerentanan kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia memperparah situasi. Trauma psikologis masyarakat juga menjadi dimensi yang sering terabaikan, padahal bencana berulang dapat menurunkan ketahanan sosial secara signifikan. Semua ini menunjukkan bahwa banjir bukan hanya fenomena hidrologis, tetapi juga tragedi kemanusiaan yang mengubah ritme hidup masyarakat Aceh–Sumatera.

Selain kerugian fisik dan sosial, banjir juga membawa konsekuensi ekologis jangka panjang. Ekosistem sungai terganggu, kualitas air menurun drastis akibat limbah dan lumpur, serta banyak spesies lokal kehilangan habitatnya. Bencana ini juga mempercepat degradasi lahan dan memicu bibit-bibit bencana baru seperti longsor dan penyakit berbasis air (Ridwan & Sarjito, 2024). Bahkan, banjir besar dapat mengubah alur sungai dan struktur tanah sehingga mempengaruhi pola aliran air untuk jangka panjang. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam hitungan hari atau minggu, tetapi bisa menjadi ketidakstabilan ekologis berkelanjutan yang mempengaruhi generasi mendatang.

Dari perspektif teologis, banjir Aceh–Sumatera mengandung nilai-nilai reflektif yang penting. Dalam pandangan Islam, alam bukan sekadar objek fisik, melainkan ayat-ayat Tuhan yang membawa pesan moral dan spiritual. Ketika kerusakan terjadi, ayat-ayat tersebut mengingatkan manusia bahwa ada hukum keteraturan yang telah ditetapkan Tuhan untuk menjamin keseimbangan alam. Bencana menjadi tanda bagi manusia untuk merenungkan kembali bagaimana mereka mengelola bumi yang telah dipercayakan kepada mereka sebagai

amanah. Dalam hal ini, banjir tidak hanya menjadi ujian kesabaran, tetapi juga panggilan untuk memperbaiki moralitas ekologis.

Ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah tangan manusia memberikan dasar teologis bahwa banjir Aceh-Sumatera bukan sekadar kehendak Tuhan tanpa sebab. Kerusakan ini merupakan konsekuensi moral dari tindakan manusia yang merusak keseimbangan. Manusia sering kali mengabaikan peringatan alam dan terus mengeksploitasi tanpa batas. Perspektif teologis menempatkan peristiwa banjir sebagai momen untuk introspeksi: apakah manusia telah melampaui batas dalam menggunakan sumber daya alam? Apakah manusia telah lalai dalam menjalankan amanah sebagai penjaga bumi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk dikaji sebagai bagian dari hikmah di balik bencana.

Banjir Aceh-Sumatera dapat dipahami sebagai bentuk teguran ilahi agar manusia kembali pada nilai moderasi dan keseimbangan. Dalam ajaran Islam, prinsip tidak berlebihan merupakan fondasi etika ekologis yang sangat kuat. Ketika manusia hidup melampaui batas konsumsi, menebang hutan tanpa reboisasi, dan memanfaatkan alam demi keuntungan sesaat, maka mereka telah melanggar prinsip moderasi tersebut. Banjir menjadi salah satu konsekuensi dari pelanggaran ini. Nilai teologis bencana mengingatkan bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah, dan merusaknya adalah bentuk ketidaktaatan terhadap aturan Tuhan.

Relasi manusia-alam yang rusak tidak hanya dilihat dari segi tindakan, tetapi juga dari cara pandang. Banyak masyarakat yang memandang alam sebagai sumber daya ekonomi semata, bukan sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik. Dalam perspektif filosofis-teologis, pandangan reduktif ini melahirkan eksploitasi yang tidak terkendali. Banjir kemudian menjadi "cermin spiritual" yang memperlihatkan bagaimana hubungan manusia dengan alam tidak lagi dibangun atas rasa hormat dan tanggung jawab, tetapi atas dominasi dan kerakusan. Refleksi teologis mengajarkan bahwa perubahan pola pikir adalah langkah penting untuk memperbaiki hubungan ini.

Banjir Aceh-Sumatera mengajarkan bahwa krisis ekologis adalah krisis moral dan spiritual. Perbaikan lingkungan tidak hanya bergantung pada teknologi, rekonstruksi fisik, atau kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesadaran etis manusia dalam menghargai alam sebagai anugerah Tuhan. Kesadaran ini perlu dibangun melalui pendidikan lingkungan yang berlandaskan nilai keagamaan, pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ekosistem, serta komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum lingkungan secara tegas. Banjir menjadi momentum untuk kembali pada nilai-nilai ketauhidan, amanah, dan moderasi dalam mengelola bumi.

Banjir Aceh-Sumatera bukan sekadar peristiwa bencana alam, tetapi juga narasi besar tentang bagaimana manusia telah keliru memaknai hubungannya dengan alam. Bencana ini hadir sebagai cermin yang memantulkan realitas rusaknya etika ekologis, sekaligus sebagai alarm teologis yang mengajak manusia kembali pada nilai-nilai kebaikan. Agar bencana serupa tidak terus berulang,

manusia harus merekonstruksi ulang relasi mereka dengan alam berdasarkan prinsip keharmonisan, tanggung jawab, dan keimanan. Dari sinilah lahir harapan bahwa Aceh, Sumatera, dan seluruh wilayah Indonesia dapat menuju masa depan ekologis yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Model Ekoteologi Terapan bagi Penanggulangan Bencana: Integrasi Nilai Filsafat Islam dengan Kebijakan Lingkungan Modern

Model ekoteologi terapan semakin mendapatkan perhatian dalam diskursus penanggulangan bencana modern karena menawarkan landasan spiritual, moral, serta pendekatan praktis yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan (Ramadhan, 2025). Dalam konteks Islam, ekoteologi tidak hanya berbicara tentang hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam, tetapi juga menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan merupakan bagian dari amanah ilahi yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika bencana alam semakin sering terjadi dan intensitasnya meningkat, integrasi nilai-nilai filsafat Islam dengan kebijakan lingkungan menjadi kebutuhan yang mendesak. Ekoteologi terapan hadir untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman teologis dan implementasi kebijakan, sehingga penanggulangan bencana tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berbasis etik dan spiritual.

Dalam pemahaman filsafat Islam, alam dipandang sebagai ayat-ayat Tuhan yang memiliki keteraturan, keseimbangan, dan fungsi tertentu bagi keberlangsungan hidup manusia. Prinsip tauhid mengajarkan bahwa segala ciptaan berada dalam kesatuan kosmis yang saling berhubungan. Oleh sebab itu, merusak alam berarti merusak harmoni yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Model ekoteologi terapan memanfaatkan prinsip ini sebagai dasar untuk membangun kesadaran ekologis masyarakat, sekaligus memberikan fondasi moral bagi kebijakan lingkungan. Dengan memahami bahwa alam bukan sekadar objek eksploitasi melainkan entitas yang memiliki nilai sakral, manusia dapat mengubah cara pandang mereka terhadap pengelolaan lingkungan dan penanggulangan bencana.

Nilai amanah menjadi pilar utama dalam model ekoteologi terapan, karena menegaskan bahwa manusia memegang tanggung jawab moral untuk menjaga bumi. Dalam konteks kebijakan lingkungan modern, nilai ini diterjemahkan ke dalam kewajiban untuk merencanakan pembangunan secara berkelanjutan, menjaga kawasan lindung, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak ekosistem. Integrasi amanah dengan kebijakan modern berarti mendorong pemerintah, lembaga, dan masyarakat agar tidak hanya melihat lingkungan sebagai sumber daya, tetapi sebagai titipan yang harus dirawat.

Prinsip keteraturan kosmos yang diajarkan dalam filsafat Islam juga berfungsi sebagai landasan penting dalam memahami fenomena bencana. Alam diciptakan dengan mekanisme yang teratur. Ketika keseimbangan ini terganggu, bencana menjadi konsekuensi yang muncul secara alamiah. Oleh sebab itu, model ekoteologi terapan menempatkan bencana sebagai tanda bahwa manusia telah melampaui batas dalam memperlakukan alam. Kebijakan lingkungan modern

kemudian diarahkan untuk memulihkan keteraturan tersebut melalui konservasi, rehabilitasi lahan, manajemen hutan berkelanjutan, dan revitalisasi daerah aliran sungai. Integrasi kedua pendekatan ini menghasilkan kebijakan yang tidak hanya berlandaskan data ilmiah, tetapi juga memiliki dimensi moral spiritual yang kuat.

Salah satu kontribusi terbesar model ekoteologi terapan adalah kemampuannya membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pencegahan bencana. Selama ini banyak kebijakan fokus pada respons pasca-bencana, padahal Islam mengajarkan bahwa mencegah kerusakan (*dar'ul mafasid*) lebih utama daripada memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi. Dengan mengintegrasikan prinsip ini ke dalam kebijakan lingkungan, pemerintah dapat mendorong edukasi ekologis berbasis nilai agama, budaya mitigasi yang lebih kuat, serta penyusunan regulasi yang melarang praktik merusak alam. Model ini memperkuat hubungan antara etika keagamaan dan kebijakan publik secara harmonis.

Dalam aspek implementasi, model ekoteologi terapan menekankan perlunya kolaborasi antara ulama, akademisi, pemerintah, dan masyarakat. Para ulama dapat menyampaikan pesan ekologis dalam khotbah, pengajian, dan materi pendidikan umat, sehingga kesadaran lingkungan tumbuh dari tingkat spiritual. Akademisi dapat memperkuat model ini dengan memberikan riset ilmiah, data kebencanaan, dan evaluasi kebijakan. Pemerintah kemudian menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam kebijakan konkret seperti zonasi bencana, pemetaan risiko, pembangunan tanggul alami, dan penguatan regulasi. Keterlibatan masyarakat menjadikan model ini lebih efektif, karena perubahan perilaku ekologis hanya dapat terwujud jika masyarakat memahami pentingnya menjaga lingkungan.

Salah satu bentuk integrasi praktis antara nilai Islam dan kebijakan modern adalah model pengelolaan DAS berbasis prinsip *rahmatan lil 'alamin* (Rifzikka, 2024). Prinsip ini mengajarkan bahwa segala tindakan manusia harus membawa kemaslahatan bagi seluruh makhluk. Dalam konteks kebijakan lingkungan, hal ini diterjemahkan dalam pelestarian hutan, penanaman kembali lahan gundul, serta pengurangan aktivitas ilegal seperti penebangan liar dan penambangan tanpa izin. Dengan mengutamakan kemaslahatan ekologis, kebijakan ini tidak hanya melindungi manusia dari bencana banjir dan longsor, tetapi juga menjaga kelangsungan hidup flora dan fauna yang menjadi bagian dari ekosistem.

Model ekoteologi terapan juga memberikan perspektif teologis yang memperkuat disiplin dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam filsafat Islam, pelanggaran terhadap keseimbangan alam dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kebaikan dan keadilan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan dapat dimaknai sebagai bentuk amar ma'ruf nahi munkar dalam ranah ekologi. Dengan mengintegrasikan pemahama eluruhan narasi ini menunjukkan bahwa model ekoteologi terapan adalah pendekatan integratif yang memadukan dimensi spiritual, moral, ekologi, dan kebijakan modern untuk penanggulangan bencana. Pendekatan ini menegaskan n teologis ini, kebijakan modern dapat memperoleh legitimasi moral yang lebih kuat, sehingga efektivitasnya meningkat. Masyarakat pun lebih mudah

memahami bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari ketaatan kepada Tuhan.

Di tingkat komunitas, model ekoteologi terapan membuka ruang bagi gerakan lingkungan berbasis kearifan lokal yang dipadukan dengan nilai Islam. Masyarakat Aceh, Sumatera, Lombok, dan berbagai daerah lain memiliki tradisi yang menghormati alam sebagai bagian dari kehidupan. Ketika nilai-nilai lokal tersebut digabungkan dengan prinsip iman dan ketakwaan, muncullah gerakan ekologis yang kuat dan berkelanjutan. Seperti, program sedekah pohon, gerakan masjid hijau, dan patroli ekologis yang melibatkan pemuda dan tokoh agama. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga gerakan moral masyarakat.

Model ekoteologi terapan juga sangat relevan dalam mengatasi kerentanan sosial-ekologis di daerah rawan bencana. Banyak komunitas yang hidup di sekitar sungai, hutan, dan lereng gunung tidak memiliki pemahaman memadai tentang risiko ekologis. Dalam hal ini, pendekatan Islami memberikan cara untuk membangun kesadaran melalui pendidikan spiritual yang lebih mudah diterima dibandingkan pendekatan teknis semata. Ketika masyarakat memahami bahwa menjaga alam adalah ibadah dan kerusakan adalah dosa sosial, motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam mitigasi bencana meningkat secara signifikan. Integrasi ini membentuk masyarakat yang lebih tangguh dan berdaya.

Dalam ranah perencanaan kebijakan, model ekoteologi terapan dapat dijadikan kerangka evaluasi untuk menilai apakah suatu program pembangunan sudah sejalan dengan nilai keberlanjutan. Pembangunan yang eksploitatif, merusak hutan, atau menimbulkan polusi dapat dikritisi melalui prinsip *maqashid al-shariah* yang mengutamakan penjagaan jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Jika pembangunan berpotensi memicu bencana, maka kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak bertentangan dengan tujuan syariah.

Kesadaran bahwa bencana adalah persoalan multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi, tetapi membutuhkan kesadaran moral manusia terhadap alam. Integrasi nilai filsafat Islam dengan kebijakan lingkungan modern memberikan harapan baru bagi pembangunan yang berkelanjutan, etis, dan selaras dengan kehendak Tuhan. Jika model ini diimplementasikan secara konsisten, bukan hanya risiko bencana yang dapat diminimalkan, tetapi juga tercipta harmoni baru antara manusia dan alam.

KESIMPULAN

Kajian mengenai ekoteologi dalam perspektif filsafat Islam menunjukkan bahwa krisis lingkungan, termasuk banjir yang terjadi di Aceh-Sumatera, tidak hanya dipicu oleh faktor ekologis dan teknis, tetapi juga oleh persoalan moral dan spiritual yang berakar pada cara pandang manusia terhadap alam. Nilai-nilai tauhid, amanah, khalifah, dan mizan yang seharusnya menjadi landasan etika ekologis umat Islam terbukti belum terinternalisasi secara utuh dalam praktik kehidupan sosial. Ketidakseimbangan antara idealitas ajaran Islam dan perilaku

manusia memunculkan berbagai bentuk kerusakan lingkungan yang pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya intensitas dan dampak bencana. Karena itu, membaca fenomena banjir melalui perspektif ekoteologi membantu memperjelas bahwa problem ekologis sesungguhnya merupakan problem paradigmatis yakni problem cara manusia memaknai dan memperlakukan ciptaan.

Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi relasi manusia–alam melalui integrasi nilai-nilai filsafat Islam dalam kebijakan lingkungan, pendidikan publik, dan pembangunan daerah. Ekoteologi tidak hanya relevan sebagai konsep teoretis, tetapi juga sebagai kerangka etis yang dapat memandu masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan lingkungan. Refleksi atas banjir Aceh–Sumatera memperlihatkan bahwa upaya mitigasi bencana harus melampaui pendekatan teknis dan mencakup pembenahan moral, spiritual, dan paradigma ekologis umat manusia. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi penguatan perspektif keagamaan sebagai fondasi etis dalam menghadapi krisis lingkungan dan membuka ruang bagi formulasi kebijakan yang lebih berkelanjutan, humanis, dan selaras dengan ajaran Islam.

REFERENSI

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.38073/adabuna.v3i2.1563>
- Adila, K., Rha'in, A., & Bisyr, M. H. (2025). The Meaning of the Term Al-Fasad in the Qur'an: A Semantic Perspective of Toshihiko Izutsu. *Aqwal: Journal of Qur'an and Hadis Studies*, 6(2), 258–277. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v6i2.13270>
- Amanda, S. P., Alfiyah, D., Aprilianto, A., & Mashuri, I. (2024). *Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia*. 7(1).
- Fauzan, A. (2022). Relasi Doa dengan Usaha Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 2(1), 55–78. <https://doi.org/10.19109/jsq.v2i1.11523>
- Kartika, Galib, M., & Abubakar, A. (2025). Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kajian Tafsir Tematik. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 11(1), 363–372. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505>
- Lutfiyah, S. K., & Kurjum, M. (2024). Analisis Hadis tentang Ekoteologi dan Relevansinya dalam Membangun Kesadaran Lingkungan melalui Pendidikan Sekolah Alam. *Al I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(3).
- Mursi, H. S., Anam, A. K., Hasan, A., & Huda, N. (2023). Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 8(1). <https://doi.org/10.30868/at.v8i01.4474>

- Putra, V. A., & Kartika, Y. (2025). Peran Hutan Lindung Dalam Menjaga Keseimbangan Lingkungan Dari Ancaman Banjir (Studi Kasus Tambang Timah Ilegal Di Das Belo Laut). *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(3).
- Qonita, U., Melfirosha, B. N., & Parhan, M. (2025). Disparitas dan Sinergitas Epistemologi Filsafat Al-Farabi dan Ibnu Sina dalam Pendidikan Islam 5.0. *Refleksi Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam*, 25(2), 53–92. <https://doi.org/10.14421/ref.v25i2.5754>
- Ramadhan, L. P. (2025). Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang, Provinsi Banten. *BELEID: Journal of Administrative Law and Public Policy*, 3(1).
- Ridwan, M., & Sarjito, J. (2024). Studi Kajian Dampak Perubahan Tutupan Lahan terhadap Kejadian Banjir di Daerah Aliran Sungai. *ENVIRO: Journal of Tropical Environmental Research*, 26(1), 38. <https://doi.org/10.20961/enviro.v26i1.93145>
- Rifzikka, S. A. (2024). STUDI ANALISIS TAFSIR SURAH AR-RUM AYAT 41 TENTANG KERUSAKAN LINGKUNGAN. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 9(2), 254–298. <https://doi.org/10.21580/jish.v9i2.23659>
- Theguh Saumantri, & Usman Ismail, A. (2025). Hermeneutic's Ibn Arabi: An Alternative in Understanding Texts for Islamic Moderation. *Refleksi Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam*, 25(2). <https://doi.org/10.14421/ref.v25i2.5724>
- Wafa, A. (2025a). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Ekoteologi Pada Siswa Madrasah dalam Menghadapi Krisis Lingkungan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5(2).
- Wafa, A. (2025b). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Ekoteologi Pada Siswa Madrasah dalam Menghadapi Krisis Lingkungan. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5.
- Wasil, W., & Muizudin, M. (2023). Ekoteologi dalam Menyikapi Krisis Ekologi di Indonesia Perspektif Seyyed Hossein Nasr. *Refleksi*, 22(1). <https://doi.org/10.15408/ref.v22i1.31403>
- Widiastuty, H., & Anwar, K. (2025). Ekoteologi Islam: Prinsip Konservasi Lingkungan dalam Al-Qur'an dan Hadits serta Implikasi Kebijakannya. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 11(1). https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v11i1.2149.